

SKRIPSI
URGENSI PENGATURAN AMBANG BATAS MAKSIMAL JUMLAH
PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN DI INDONESIA

Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Universitas Andalas

Oleh:

MUHAMMAD DAFFA MUHADZIB
2210112181

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PK V)



Pembimbing :

Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.

Fadli Ramadhanil, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2026

	No. Alumni Universitas		Muhammad Daffa Muhadzib		No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/ Tgl Lahir	: Jambi, 01 Desember 2003	f. Tanggal Lulus	: 29 Juli 2026	
	b. Nama Orangtua	: Helfiyan Amnun dan Lidya Mulyati	g. Predikat Lulus	: Dengan Pujian	
	c. Fakultas	: Hukum	h. IPK	: 3,95	
	d. PK	: Hukum Tata Negara	i. Lama Studi	: 3 Tahun 11 Bulan	
	e. No. BP	: 2210112181	j. Alamat	: Jl. H. Ibrahim Gang Damai Raya, Kenali Besar, Alam Barajo, Kota Jambi.	

URGENSI PENGATURAN AMBANG BATAS MAKSIMAL JUMLAH PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA

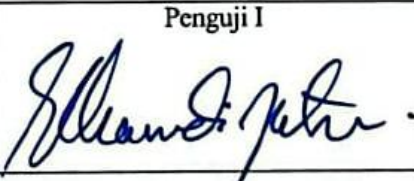
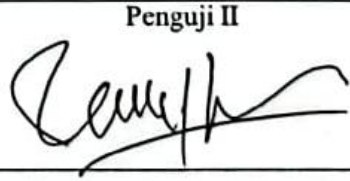
Muhammad Daffa Muhadzib, 2210112181, Program Kekhususan Hukum Tata Negara (PK V), Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 129 Halaman, 2026.

ABSTRAK

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXI/2024, diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum untuk membuka peluang munculnya lebih banyak pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga pemilih memperoleh pilihan yang lebih beragam. Salah satu upaya yang dapat diterapkan ialah dengan mengatur ketentuan ambang batas maksimal jumlah partai politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Rumusan masalah dalam penelitian ini: Pertama, bagaimana perkembangan pengaturan ambang batas minimal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden? Kedua, bagaimana dampak ketiadaan pengaturan ambang batas maksimal jumlah partai politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia? Ketiga, bagaimana formula pengaturan ambang batas maksimal dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ke depan? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan historis. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan ambang batas minimal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden telah menjadi objek perdebatan berkepanjangan. Di satu sisi, ketentuan tersebut dipandang sebagai instrumen penguatan sistem Presidensial dan penyederhanaan partai politik, namun di sisi lain dianggap membatasi hak partai politik, mempersempit ruang kompetisi, dan mengurangi pilihan alternatif bagi pemilih. Dalam praktiknya, penerapan ambang batas minimal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menyebabkan terbentuknya koalisi partai politik yang cenderung pragmatis. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan untuk mengatur ketentuan ambang batas maksimal jumlah partai politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dengan dua opsi formula yakni, Pertama, 50% jumlah partai politik peserta pemilu untuk mencegah calon tunggal. Kedua, 30% - 40% jumlah partai politik peserta pemilu untuk menghadirkan lebih banyak alternatif pilihan bagi pemilih dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Kata Kunci: Ambang Batas; Koalisi; Partai Politik; Pemilihan Umum.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 29 Juli 2026.
Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
		
Muhammad Daffa Muhadzib	Ihamdi Putra, S.H., M.H.	M Nurul Fajri, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Departemen Hukum Perdata: Arfiani, S.H., M.H.


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	No. University Alumni		Muhammad Daffa Muhadzib		No. Faculty Alumni	
	a. Place/Date of Birth	: Jambi, 01 December 2003	k. Graduation Date	: July 29 th 2026		
	b. Parents Name	: Helfiyan Amnun and Lidya Mulyati	l. Pass Predicate	: Cumlaude		
	c. Faculty	: Law	m. GPA	: 3,95		
	d. Concentration	: Constitutional Law	n. Length of Study	: 3 years 11 Month		
	e. Student ID	: 2210112181	o. Address	: Jl. H. Ibrahim Gang Damai Raya, Kerali Besar, Alam Barajo, Kota Jambi.		

THE URGENCY OF REGULATING THE MAXIMUM THRESHOLD FOR THE NUMBER OF POLITICAL PARTIES IN THE PRESIDENTIAL AND VICE PRESIDENTIAL CANDIDACY IN INDONESIA

Muhammad Daffa Muhadzib, 2210112181, Specialization Program in Constitutional Law (PK V), Faculty of Law, Andalas University, 129 pages, 2026.

ABSTRACT

Following Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXI/2024, a revision of the General Election Law is needed to open up opportunities for more presidential and vice-presidential candidate pairs, so that voters have a more diverse choice. One effort that can be implemented is to regulate the provisions of the maximum threshold for the number of political parties in the nomination of the President and Vice President. The problem formulation in this study: First, how has the development of the regulation of the minimum threshold for presidential and vice-presidential nominations? Second, what is the impact of the absence of a regulation on the maximum threshold for the number of political parties in the nomination of the President and Vice President in Indonesia? Third, what is the formula for regulating the maximum threshold for presidential and vice-presidential nominations in the future? This study uses a normative juridical method with a conceptual approach, a legislative approach, a comparative approach, and a historical approach. The data used are primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the regulation of the minimum threshold for presidential and vice-presidential nominations has been the object of prolonged debate. On the one hand, this provision is seen as an instrument for strengthening the presidential system and simplifying political parties. However, on the other hand, it is considered to limit the rights of political parties, narrow the space for competition, and reduce alternative choices for voters. In practice, the application of a minimum threshold for nominating a presidential and vice-presidential candidate has led to the formation of political party coalitions that tend to be pragmatic. To address this problem, this study proposes regulating the maximum threshold for the number of political parties in nominating a presidential and vice-presidential candidate with two formula options: first, 50% of the total number of political parties participating in the election to prevent a single candidate. Second, 30% - 40% of the total number of political parties participating in the election to provide more alternative choices for voters in the presidential and vice presidential election.

Keywords: Coalition; General Election; Political Parties; Threshold.

This minor thesis has defended in front of the examiner team at, July 29rd 2026.

Examiner,

Signature	Examiner I	Examiner II
		
Muhammad Daffa Muhadzib	Ihamdi Putra, S.H., M.H.	M Nurul Fajri, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of Constitutional Law Departement: Arfiani, S.H., M.H.


Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: